

# PERAN ELIT LOKAL DALAM MENGUATKAN EKSISTENSI MASYARAKAT ADAT DI KECAMATAN BUNTU PEPASAN KABUPATEN TORAJA UTARA

Reinsart Sampe Rompon

NPP. 31.0842

*Asdaf Kabupaten Toraja Utara, Provinsi Sulawesi Selatan*

*Program Studi Politik Indoensia Terapan*

Email: [reinsartsr@gmail.com](mailto:reinsartsr@gmail.com)

Pembimbing Skripsi: Sudarmono, S.STP, M.Si, Ph.D.

## ABSTRACT

**Problem Statement/Background (GAP):** The author focuses on the problem on customary and cultural issues that may threaten the existence of indigenous peoples. **Purpose:** This research aims to understand and explain the role of local elites in strengthening the existence of indigenous communities in Buntu Pepasan District. **Method:** This research uses a qualitative approach with a focus on data collection techniques through in-depth interviews with three local elite groups: formal elites, religious elites, and civil elites. **Result:** The research results show the various roles played by each elite group in supporting indigenous communities. Formal elites play a role in providing legal protection and official recognition of the rights of indigenous peoples. Meanwhile, religious elites provide moral and spiritual support, and help maintain the traditional values that are the foundation of indigenous communities. On the other hand, civil elites or traditional leaders have a role in maintaining and developing local culture and customs. **Conclusion:** The role of each local elite in terms of (a) position dimensions, shows that the local elite has a position as a party that plays a role in maintaining cultural heritage and the sustainability of indigenous communities. Local elites act as leaders in implementing customs, caring for cultural heritage, and resolving problems that may arise in society. (b) reputation dimension, as parties entrusted with trust by the community, local elites have the responsibility to manage and maintain the lives of indigenous communities and use their power to strengthen the existence of indigenous communities. (c) decision dimension, local elites make policies as guidelines for managing community life and strengthening the existence of indigenous communities. The implications of these findings can be a basis for developing more effective policies in supporting the sustainability of indigenous communities in the future.

**Keywords:** Role, Local Elites, Indigenous People of Toraja

## ABSTRAK

**Permasalahan/Latar Belakang (GAP):** Penulis memfokuskan permasalahannya pada permasalahan adat dan budaya yang dapat mengancam keberadaan masyarakat adat. **Tujuan:** Penelitian ini bertujuan untuk memahami dan menjelaskan peran elit lokal dalam memperkuat eksistensi masyarakat adat di Kecamatan Buntu Pepasan. **Metode:** Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan fokus teknik pengumpulan data melalui wawancara mendalam

terhadap tiga kelompok elit lokal: elit formal, elit agama, dan elit sipil. **Hasil/Temuan:** Hasil penelitian menunjukkan berbagai peran yang dimainkan oleh masing-masing kelompok elit dalam mendukung masyarakat adat. Elit formal berperan dalam memberikan perlindungan hukum dan pengakuan resmi terhadap hak-hak masyarakat adat. Sedangkan elite agama memberikan dukungan moral dan spiritual, serta membantu menjaga nilai-nilai tradisional yang menjadi landasan masyarakat adat. Di sisi lain, elite sipil atau tokoh adat mempunyai peran dalam menjaga dan mengembangkan budaya dan adat istiadat setempat. **Kesimpulan:** Peran masing-masing elite lokal ditinjau dari (a) dimensi kedudukan, menunjukkan bahwa elite lokal mempunyai kedudukan sebagai pihak yang berperan dalam menjaga warisan budaya dan keberlangsungan masyarakat adat. Elit lokal berperan sebagai pemimpin dalam melaksanakan adat istiadat, merawat warisan budaya, dan menyelesaikan permasalahan yang mungkin timbul di masyarakat. (b) dimensi reputasi, sebagai pihak yang diberi kepercayaan oleh masyarakat, elit lokal mempunyai tanggung jawab untuk mengelola dan mempertahankan kehidupan masyarakat adat serta menggunakan kekuasaannya untuk memperkuat eksistensi masyarakat adat. (c) dimensi keputusan, elit lokal menjadikan kebijakan sebagai pedoman dalam menata kehidupan masyarakat dan memperkuat eksistensi masyarakat adat. Implikasi dari temuan ini dapat menjadi landasan untuk mengembangkan kebijakan yang lebih efektif dalam mendukung keberlanjutan masyarakat adat di masa depan.

**Kata Kunci:** Peran, Elit Lokal, Masyarakat Adat Toraja

## I. PENDAHULUAN

### 1.1 Latar Belakang

Negara Indonesia memberikan pengakuan terhadap masyarakat adat secara fundamental diatur dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dalam pasal 18B ayat 2 yang berbunyi demikian “Negara mengakui dan menghormati kesatuan-kesatuan masyarakat hukum adat beserta hak-hak tradisionalnya sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia, yang diatur dalam Undang-Undang.”

Setiap suku di Indonesia tentunya sampai sekarang masih mempertahankan eksistensi kebudayaannya dalam artian adat istiadat yang mereka yakini. Namun, tidak sedikit juga suku yang sampai sekarang sudah tidak lagi mempertahankan adat istiadatnya, mereka secara perlahan-lahan mulai bernegosiasi dengan perkembangan era modernitas sekarang (Barumbun, 2013). Proses modernitas ini tidak terjadi secara spontan melainkan dilandasi oleh kesadaran waktu sehingga pergeseran atau perubahan akan terjadi secara perlahan. Apabila sistem kepercayaan dan sistem pengetahuan suatu masyarakat mengalami pergeseran, maka sistem nilai-nilai lama akan terdesak oleh nilai-nilai baru yang akan membawa perubahan baru terhadap sistem nilai yang telah dianut.

Masyarakat adat memiliki konteks sosial dan sejarah yang kaya dan kompleks. Mereka adalah kelompok-kelompok masyarakat yang telah tinggal di suatu wilayah atau daerah tertentu selama berabad-abad, bahkan sebelum kedatangan pengaruh budaya dari luar (Fadli et al., 2018). Konteks sosial masyarakat adat didasarkan pada karakteristik seperti kehidupan komunitas yang kuat, nilai-nilai kolektivitas, serta sistem adat yang mengatur hubungan antar anggota masyarakat. Masyarakat adat sering kali memegang keyakinan dan praktik-praktik spiritual tradisional yang menjadi bagian integral dari kehidupan masyarakat adat. Pada umumnya, masyarakat adat memiliki struktur sosial hierarkis dengan peran penting elit lokal dalam menjaga harmoni dan keseimbangan dalam komunitas.

Suku Toraja adalah suku yang menetap di pegunungan bagian utara Sulawesi Selatan, Indonesia. Populasinya diperkirakan sekitar 1 juta jiwa, dengan 500.000 di antaranya masih tinggal di Kabupaten Tana Toraja, Kabupaten Toraja Utara, dan Kabupaten Mamasa (Badan

Pusat Statistik, 2022). Sisanya hidup merantau dan bekerja di luar wilayah Tana Toraja. Mayoritas suku Toraja memeluk agama Kristen, sementara sebagian menganut Islam dan kepercayaan animisme yang dikenal sebagai *Aluk To Dolo*. Pemerintah Indonesia telah mengakui kepercayaan ini sebagai bagian dari Agama Hindu Dharma.

Setiap struktur sosial masyarakat adat memiliki orang yang dianggap sebagai tokoh yang mampu mengarahkan dan mengambil keputusan untuk kepentingan bersama. Tallulembang dalam Paledung (2021) menyatakan, tokoh yang berpengaruh dalam masyarakat Toraja disebut *Toparengnge'* atau *Ambe' Tondok*, mereka adalah masyarakat yang termasuk dalam golongan elit lokal, meskipun tidak memiliki jabatan di dalam struktur pemerintahan namun memberikan pengaruh yang besar dalam kehidupan bermasyarakat. Segala sesuatu yang akan dikerjakan di dalam suatu desa atau lembang yang bersifat kepentingan bersama, harus dilaksanakan atas sepengetahuan dan seizin *Toparengnge'*. Para pemuka adat tersebut tergolong ke dalam elit masyarakat sipil, mereka tidak masuk ke dalam elit yang memimpin sistem pemerintahan namun memiliki kekuasaan di dalam masyarakat.

Elit lokal memiliki peran yang penting dalam memperkuat kedudukan dan melindungi kepentingan masyarakat adat. Mereka sering kali menjadi pilar utama dalam mempertahankan warisan budaya, tradisi, serta hak-hak tanah dan sumber daya alam (Haryanto, 2005). Selain itu, elit lokal juga membantu dalam mengkoordinasikan kebutuhan dan aspirasi komunitas kepada pihak-pihak terkait, serta ikut merumuskan kebijakan yang lebih inklusif untuk perlindungan hak-hak masyarakat adat. Melalui posisi kepemimpinan mereka, elit lokal dapat menjembatani kesenjangan antara dunia modern dengan nilai-nilai tradisional serta memberikan nasihat bijaksana bagi komunitas. Peran elit lokal dalam memperkuat kedudukan masyarakat adat sangat penting untuk menjaga keberlanjutan budaya, nilai dan norma adat, serta kesejahteraan komunitas.

Untuk melihat bagaimana peran elit lokal terhadap eksistensi masyarakat adat maka kemudian digunakan Teori Peran Elit oleh Putnam dalam Haryanto (2005) untuk menganalisis peran elit itu sendiri, menggunakan tiga Dimensi; Posisi, Reputasi dan Keputusan. Dengan dimensi-dimensi tersebut diharapkan peneliti mampu untuk menjawab rumusan masalah yang telah ditentukan sebelumnya, yakni bagaimana peran elit lokal dalam menguatkan eksistensi masyarakat adat di Kecamatan Buntu Pepasan Kabupaten Toraja Utara, serta dampak kebijakan pemerintah atau produk hukum terhadap eksistensi kedudukan masyarakat adat di Kecamatan Buntu Pepasan Kabupaten Toraja Utara.

## **1.2 Kesenjangan Masalah yang Diambil**

Terjadinya pergeseran nilai-nilai adat dan budaya yang dapat mempengaruhi keberadaan atau eksistensi masyarakat adat menjadi suatu permasalahan yang harus diselesaikan oleh elit lokal sebagai pihak yang memiliki kewenangan, kedudukan dan kekuasaan terhadap masyarakatnya. Dalam struktur sosial masyarakat adat, terdapat beberapa atau sekumpulan orang yang memiliki kedudukan sosial di atas masyarakat lainnya. Mereka adalah para elit yang memiliki pengaruh dan peran terhadap tata kehidupan masyarakat. Dinamika kehidupan yang terjadi di dalam masyarakat menjadi tanggung jawab dari para elit, baik itu elit pemerintah maupun elit non-pemerintah. Agar kehidupan masyarakat adat dapat tetap terjaga maka diperlukan peran dari para elit tersebut. Lingkup masyarakat adat tidak terlepas dari elit lokal yang melekat di dalam struktur masyarakat adat itu sendiri. Peran elit lokal sangatlah penting bagi masyarakat adat, kekuasaan dan kendali yang dimiliki harus digunakan sebijak mungkin untuk kepentingan masyarakat bersama.

Salah satu contoh adanya pergeseran nilai ditunjukkan dari budaya adu kerbau yang pada hakikatnya adalah tradisi yang dilakukan orang Toraja dalam *rambu solo'* (upacara kedukaan). Tetapi, masyarakat Toraja telah menjadikan adu kerbau sebagai cara untuk mendapatkan uang yang dengan cara berjudi (Tonapa & Kumala, 2022), masyarakat menormalisasi judi dengan

bersembunyi dalam istilah “adat”. Inilah yang kemudian menjadi suatu perbuatan yang membuat moral anak muda Toraja rusak, sehingga dari sini dapat kita lihat bagaimana pergeseran nilai dari tradisi *Ma'pasilaga Tedong* akibat pengaruh modernisasi.

Bentuk lain dari adanya pergeseran nilai yang ada di Toraja yaitu penyalahgunaan pakaian atau busana oleh masyarakat dalam acara-acara adat di Toraja, baik itu pada acara *rambu tuka'* (upacara syukuran) maupun *rambu solo'* (upacara kedukaan). Penggunaan atribut adat maupun busana adat yang sekarang banyak disalahgunakan, misalnya penggunaan pakaian berwarna hitam yang berdasarkan dengan adat Toraja identik dengan suasana kedukaan (Aswar, 2023). Banyak masyarakat yang sekarang malah menggunakan pakaian berwarna hitam pada acara-acara syukuran (*rambu tuka'*) ataupun sebaliknya menggunakan warna pakaian yang seharusnya digunakan pada acara *rambu tuka'* pada acara kedukaan.

### **1.3 Penelitian Terdahulu**

Penelitian yang dilakukan ini terinspirasi dari beberapa penelitian yang membahas konteks elit lokal maupun yang membahas konteks masyarakat adat. Penelitian yang dilakukan oleh Gasing Bulan Paledung dan Nurliah Nurdin (2021) memiliki tujuan untuk mengetahui bagaimana dampak dari Peraturan Daerah Kabupaten Toraja Utara Nomor 3 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Lembang yang mengatur lembaga adat di setiap lembang atau desa di Kabupaten Toraja Utara terhadap lembaga adat *Tongkonan*. Sedangkan penelitian ini tidak hanya berfokus pada kebijakan yang dikeluarkan oleh elit melainkan juga tentang bagaimana peran-peran yang dapat mempengaruhi eksistensi masyarakat adat. Penelitian oleh (Fadli et al., 2018) bertujuan untuk menggambarkan dan menganalisis peran elit lokal dalam meningkatkan partisipasi pemilih serta dampak keterlibatan elit lokal pada pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Toraja Utara tahun 2015. Penelitian yang dilakukan (Haryanto, 2009) berfokus Untuk mengetahui perubahan hubungan antara negara dengan elit politik lokal pasca runtuhnya pemerintahan Orde Baru. Penelitian yang dilakukan (Sawaludin et al., 2022) memiliki tujuan khusus yaitu mendeskripsikan dan menggambarkan kearifan lokal masyarakat Sade, mengidentifikasi nilai-nilai filosofis kearifan lokal, serta mengetahui peran elit dalam mempertahankan nilai-nilai kearifan lokal pada masyarakat adat *dusun sade* di tengah arus modernisasi. Penelitian yang dilakukan (Nasya, 2022) bertujuan untuk mengetahui peran elit lokal serta implikasi kepentingannya dalam hal pembangunan desa terkhusus di Desa Kajongan, Kecamatan Kajen, Kabupaten Pekalongan.

### **1.4 Pernyataan Kebaruan Ilmiah**

Perbedaan penelitian yang dilakukan oleh penulis dengan penelitian terdahulu yang sudah dipaparkan di atas masing-masing membahas tentang elit lokal dan pengaruhnya terhadap sistem nilai di masyarakat, pembangunan di desa, peningkatan partisipasi politik masyarakat, dan lain sebagainya. Sedangkan pada penelitian ini, selain lokus penelitian yang beda, peneliti juga menekankan pada teori peran elit yang dikemukakan oleh Putnam dalam Haryanto (2005) dan bagaimana pengaruhnya dalam meningkatkan eksistensi masyarakat adat di kecamatan Buntu Pepasan secara keseluruhan, khususnya tentang bagaimana nilai adat dan budaya di dalam lingkungan masyarakat adat tersebut agar terus lestari dan terjaga.

### **1.5 Tujuan**

Tujuan yang ingin dicapai dari diadakannya penelitian ini adalah untuk mengetahui peran elit lokal dalam menjaga eksistensi dan keberlanjutan masyarakat adat di Kecamatan Buntu Pepasan Kabupaten Toraja Utara.

## II. METODE

Metode yang digunakan oleh peneliti di dalam penelitian ini dengan menggunakan metode kualitatif dengan penulisan yang bersifat deskriptif. Peneliti menggunakan metode deskriptif kualitatif karena dianggap sangat cocok untuk menjelaskan penelitian yang dilakukan oleh peneliti. Menurut Afrizal (2016), "Penelitian kualitatif yaitu metode penelitian Ilmu-ilmu sosial dengan mengumpulkan dan menganalisis data berupa kata-kata, atau tindakan manusia, bukan termasuk penelitian menganalisis angka".

Untuk mendapatkan data primer dapat dilakukan melalui pengumpulan langsung oleh penulis dengan wawancara mendalam dengan jumlah 10 (sepuluh) narasumber menggunakan teknik *purposive sampling*, yaitu teknik menentukan narasumber yang memang mendalami dan memahami tentang konteks elit lokal dan masyarakat adat. Narasumber yang ditentukan adalah dari pihak pemerintah, pihak tokoh agama dan pihak tokoh adat masyarakat. Adapun data sekunder yang dapat penulis peroleh dari berbagai sumber seperti buku, jurnal, laporan, Sumber Biro Statistik (BPS) dan lain sebagainya.

## III. HASIL DAN PEMBAHASAN

Penulis menganalisis peran pemuda dalam program lorong literasi Gowa di desa Paccinongang menggunakan pendapat dari Yadav yang menyatakan bahwa partisipasi dapat terjadi pada empat tahap, yaitu partisipasi dalam perencanaan/pengambilan keputusan, pelaksanaan, dan pemanfaatan hasil. Adapun pembahasan dapat dilihat pada subbab berikut.

### 3.1 Peran Elit Lokal dalam meningkatkan eksistensi masyarakat adat di Kecamatan Buntu Pepasan: Dimensi Posisi

Posisi elit lokal dalam masyarakat adat sangat relevan dengan eksistensi dan keberlanjutan masyarakat adat itu sendiri. Elit lokal memiliki peran kunci dalam mempertahankan identitas, budaya, dan tradisi masyarakat adat. Sebagai penjaga tradisi dan nilai-nilai budaya, mereka memainkan peran penting dalam melestarikan keunikan masyarakat adat dalam menghadapi tekanan modernisasi dan globalisasi.

#### a. Indikator Kedudukan

Dalam berbagai masyarakat adat di seluruh dunia, kedudukan elit lokal atau tokoh masyarakat memegang peranan yang sangat vital dalam menjaga keberlangsungan dan melestarikan warisan budaya dan tradisi-tradisi yang telah diwariskan dari generasi ke generasi (Syihabudin, 2014). Mereka tidak hanya menjadi penjaga nilai-nilai budaya dan tradisi, tetapi juga sebagai pemimpin dan penjaga keharmonisan serta kedamaian dalam komunitas mereka.

Dalam kehidupan masyarakat Toraja, terdapat konsep yang disebut "*Tallu Lalikan*", yang secara harfiah berarti "tiga pilar". Ketiga pilar ini mencakup unsur pemerintah, tokoh agama, dan tokoh adat. Dalam konteks budaya Toraja, ketiga unsur ini dianggap sebagai fondasi utama yang membentuk tatanan sosial dan kehidupan masyarakat. Mereka saling melengkapi satu sama lain dan bekerja bersama demi kesejahteraan dan kebaikan bersama.

Ketika peran elit semakin kuat dalam sebuah masyarakat adat, nilai-nilai pewarisan norma dan budaya pun turut menguat. Ini terjadi karena elit lokal tidak hanya bertanggung jawab untuk mempertahankan tradisi-tradisi yang ada, tetapi juga untuk memastikan bahwa nilai-nilai tersebut diteruskan dengan baik kepada generasi mendatang. Mereka menjadi pilar yang kokoh dalam menjaga identitas budaya sebuah komunitas, sekaligus menjaga agar tradisi-tradisi yang telah ada tidak terkikis oleh arus modernisasi yang terus mengalir.

**Tabel 1.**

**Kepercayaan Aluk To Dolo**

No	Kepercayaan Aluk To Dolo
1	<i>Puang Matua</i> , sang pencipta alam semesta
2	<i>Deata</i> , sang penjaga kehidupan
3	<i>To Mebali Puang</i> , arwah para nenek moyang yang telah mencapai <i>Puya</i> (dunia akhirat) sebagai pengawas dan pemberi berkat bagi keturunan manusia

Sumber: Wawancara dengan Bapak David Rompon, 2024

Pada **Tabel 1** bapak David Rompon selaku ketua lembaga masyarakat adat di Kecamatan Buntu Pepasan menjabarkan poin utama dalam kepercayaan *Aluk To Dolo*, yaitu kepercayaan orang Toraja dahulu sebelum masuknya agama kristen. Peran elit lokal dalam masyarakat adat juga tidak terlepas dari tantangan dan dinamika zaman. Dalam era globalisasi dan modernisasi yang semakin cepat, elit lokal harus mampu beradaptasi dan mengelola perubahan tanpa mengorbankan esensi dari tradisi dan budaya mereka. Mereka perlu menjadi penggerak yang progresif, tetapi tetap mempertahankan akar budaya yang kuat. Lebih lanjut, Israel Makole sebagai salah satu anggota DPRD Kabupaten Toraja Utara menyampaikan “Adat Toraja juga telah mengalami masa transisi, yaitu perubahan dari *aluk to dolo* (kepercayaan orang dulu) ke agama Kristen. Hal tersebut tentunya merubah beberapa nilai adat Toraja yang mau tidak mau kita harus terima, karena hal tersebut tidak dapat dihindari lagi. Maka dari itu, terjadilah peleburan antara adat toraja dengan agama kristen yang membawa perubahan dalam masyarakat, tetapi dengan nilai adat yang masih dipegang teguh dan beberapa penyesuaian dengan nilai di dalam agama Kristen.”

**b. Indikator Posisi**

Dalam konteks politik, keberadaan elit pada hakikatnya diposisikan sebagai pihak yang memiliki kewenangan dan posisi mereka yang memiliki kewenangan tersebut hanya akan berguna jika diperhadapkan pada pihak yang tidak memiliki kewenangan (Mills, 2000). Elit sebagai kelas yang memiliki kuasa kemudian mempunyai kewenangan yang lebih besar dari kewenangan yang dimiliki massa sebagai kelas yang dikuasai.

Tidak hanya sebagai penjaga tradisi, elit lokal juga berfungsi sebagai penghubung antara generasi (Haryanto, 2005). Mereka menjadi perantara yang mengantarkan nilai-nilai dan praktik-praktik tradisional kepada generasi muda, memastikan bahwa warisan budaya tersebut tidak hanya dipelajari, tetapi juga dipahami dan dihargai. Elit lokal seringkali memiliki pengetahuan mendalam tentang sejarah, tradisi dan budaya dari komunitasnya, maka dari itu berperan untuk meneruskan pengetahuannya pada generasi selanjutnya.

Bapak David selaku ketua lembaga adat masyarakat kecamatan Buntu Pepasan mengungkapkan posisi elit lokal adalah sebagai wahana yang berperan dalam mensupport hakikat nilai esensi *tallu lolona* untuk menjaga hubungan yang selaras antara manusia dan alam. *Tallu Lolona* berasal dari dua kata, *Tallu* yang artinya tiga dan *Lolona* yang bermakna pucuk kehidupan. Artinya, terdapat tiga elemen kehidupan: manusia, hewan, dan tanaman.

Ketiga elemen ini saling terkait dan bergantung satu sama lain. Ketiga elemen ini memiliki peran masing-masing dalam kehidupan masyarakat adat Toraja dapat dilihat pada tabel berikut.

**Tabel 2.**

**Filosofi Tallu Lolona**

No	Filosofi Tallu Lolona
1	<p><i>Lolo Tau</i> (Manusia), Memiliki keturunan adalah salah satu nilai yang sangat tinggi dalam hidup. Pernikahan adalah salah satu nilai, tetapi status pernikahan akan lebih tinggi jika ada anak-anak yang akan menjamin keturunan. Semakin banyak anak, semakin baik. Dengan kelahiran seorang anak, nilai seseorang menjadi lebih tinggi. Nilai seseorang akan lebih tinggi jika ia telah menjadi nenek moyang. Seseorang akan merasa bangga dan bahagia ketika dia memiliki cucu, karena kemudian dia menjadi nenek / kakek dari anak itu.</p>
2	<p><i>Lolo Tananan</i> (Tanaman), Di antara lolo tananan, padi memiliki nilai yang paling tinggi dan dengan demikian segala sesuatu yang memiliki hubungan langsung maupun tidak langsung memiliki nilai yang sepadan dengan hubungannya masing-masing. Dalam kaitannya dengan padi, tentu saja sawahlah yang memiliki nilai paling tinggi, kemudian lumbung padi yang merupakan salah satu indikator kekayaan yang paling nyata ketika kita berada di masyarakat Toraja. Sawah, kerbau, dan lainnya masih bisa bersembunyi/tidak terlihat, namun lumbung bisa dianggap sebagai pameran dari yang tidak terlihat. Keluarga yang memiliki banyak deretan <i>alang sura'</i> (lumbung padi berukir) tidak mungkin tidak memiliki sejumlah kerbau, sawah, dan harta benda lainnya.</p>
3	<p><i>Lolo Patuoan</i> (Hewan) adalah komplemen untuk kehidupan manusia, hewan tidak hanya meningkatkan nilai kekayaan seseorang, tetapi dalam kaitannya dengan nilai kekayaannya dan tentu saja dengan nilai-nilai lain (holistik) hewan adalah penolong dan alat bagi seseorang untuk mencapai atau meningkatkan kekayaan. Kerbau atau <i>tedong</i> (bahasa Toraja) khususnya, memiliki nilai tinggi, tidak hanya nilai ekonomi, tetapi terutama nilai budaya-kualitatif.</p>

Sumber: wawancara dengan Bapak David Rompon, 2024

**c. Analisis Posisi**

Permasalahan-permasalahan kebudayaan di Kecamatan Buntu Pepasan yang diangkat oleh penulis kemudian dilihat dari posisi elit lokal sebagai *Tallu Lalikan*, yaitu sebagai pihak yang bertanggung jawab penuh atas masyarakat adat di Kecamatan Buntu Pepasan. Posisi pemerintah sebagai elit formal, Pendeta sebagai elit agama dan anggota lembaga adat masyarakat sebagai elit sipil, memiliki tanggung jawab pada bidang mereka masing-masing dalam menyelesaikan permasalahan-permasalahan yang terjadi di Kecamatan Buntu Pepasan.

*Rambu solo*’ adalah upacara pemakaman yang berada di Tana Toraja. Upacara ini merupakan adat istiadat yang telah diwarisi oleh masyarakat Toraja secara turun-temurun. Dalam upacara ini diharapkan keluarga yang ditinggal mati membuat pesta sebagai penghormatan terakhir kepada mending yang telah pergi. *Rambu solo*’ merupakan suatu upacara yang meriah karena upacara itu dilangsungkan selama berhari-hari. Waktu pelaksanaan *rambu solo*’ adalah siang hari, yaitu saat matahari condong ke barat dan biasanya memakan waktu dua sampai tiga hari, bahkan dua minggu bagi kalangan bangsawan.

Sementara itu masalah yang terjadi di Kecamatan Buntu Pepasan yaitu adanya perubahan nilai pada acara *rambu solo*’ khususnya pada tahap pertunjukan adu kerbau. Tahapan adu kerbau pada acara *rambu solo*’ pada hakikatnya adalah sebuah pertunjukan yang diadakan oleh keluarga yang sedang mengadakan acara *rambu solo*’ dengan maksud untuk memberikan hiburan di tengah-tengah suasana kedukaan yang sedang dialami oleh keluarga tersebut. Namun sekarang, adu kerbau tersebut justru menjadi arena judi, dimana penonton melakukan perjudian dengan penonton lainnya dengan cara menebak kerbau mana yang akan menang dalam suatu pertandingan.

Sebagai pihak pemerintah sebagai pihak yang berwenang dalam menyelesaikan permasalahan khususnya pada tradisi adu kerbau dan penggunaan warna pakaian yang belum sesuai. Posisi elit lokal bertanggung jawab untuk memberikan peringatan hingga sosialisasi terkait nilai mana yang benar dan mana yang salah, baik itu kami tegur secara langsung ataupun melalui *kombongan* (forum diskusi) masyarakat.

### **3.2 Peran Elit Lokal dalam meningkatkan eksistensi masyarakat adat di Kecamatan Buntu Pepasan: Dimensi Reputasi**

Reputasi elit lokal bergantung pada pemeliharaan budaya dan tradisi. Orang-orang yang secara aktif memelihara dan melestarikan tradisi dan budaya komunitas mereka dihargai karena mereka berdedikasi untuk mempertahankan identitas budaya komunitas mereka. Dengan mempertahankan adat istiadat dan prinsip-prinsip masyarakat, mereka memperkuat hubungan sosial dan historis yang mendukung eksistensi masyarakat. Dalam keseluruhan, peran dan tanggung jawab elit lokal dalam memajukan kesejahteraan dan keberlanjutan menunjukkan reputasi mereka dalam masyarakat.

#### **a. Indikator Pengaruh**

Reputasi elit lokal bergantung pada pemeliharaan budaya dan tradisi. Orang-orang yang secara aktif memelihara dan melestarikan tradisi dan budaya komunitas mereka dihargai karena mereka berdedikasi untuk mempertahankan identitas budaya komunitas mereka. Dengan mempertahankan adat istiadat dan prinsip-prinsip masyarakat, mereka memperkuat hubungan sosial dan historis yang mendukung eksistensi masyarakat. Dalam keseluruhan, peran dan tanggung jawab elit lokal dalam memajukan kesejahteraan dan keberlanjutan menunjukkan reputasi mereka dalam masyarakat.

Sebagaimana dikatakan oleh salah satu anggota Lembaga adat di Lembang Paongan, Kecamatan Buntu Pepasan, saat diwawancarai di kantor Lembang Paongan mengatakan “Lembaga adat berfungsi sebagai unsur yang melaksanakan sosialisasi untuk menegakkan aturan-aturan adat dan untuk melestarikan adat di komunitas. Kontribusinya itu dalam sifat percontohan atau penampilan yang ditampilkan oleh ketokohnya. Contohnya lembaga adat harus memperlihatkan kepemimpinan, misalnya mengatur perjalanan adat, bahwa metode adat seperti ini, ini yang harus dilakukan.” Senada dengan yang dikatakan oleh Bapak Camat Buntu Pepasan saat sesi wawancara, “Kita sebagai pihak pemerintah memberikan pengaruh lewat

bentuk edukasi contohnya pada saat kita memberikan sambutan dan pada saat kita hadir di depan masyarakat adat dan tokoh-tokoh adat yang ada di desa atau kalau di Toraja disebut dengan lembang dan menyampaikan hal yang kita anggap penting untuk disampaikan kepada generasi muda, bahkan kita berkunjung ke sekolah-sekolah yg ada di kecamatan Buntu Pepasan mengenai bagaimana itu melestarikan budaya dan adat Toraja sejak dini agar para siswa dan siswi mampu memahami betul dan agar terbiasa dengan nilai adat dan budaya yang ada.”

### **b. Indikator Kekuasaan**

Elit dalam sistem kekuasaan memiliki basis kekuasaan yang kuat dalam masyarakat dan memiliki kemampuan untuk memperoleh sebagian besar sistem kekuasaan (Keller, 1984). Sebagai kelompok yang memiliki otoritas, para elit itu sendiri memiliki tujuan atau kepentingan dalam memanfaatkan kekuasaannya. Dalam struktur sosial, peran elit adalah sekelompok orang yang memiliki kekuatan untuk mencapainya. Bahkan, elit dapat membantu seseorang dari kalangan masyarakat untuk memperoleh jabatan penting dalam struktur kekuasaan tanpa menduduki jabatan tersebut.

Peran elit lokal di kecamatan Buntu Pepasan tidak lepas dari kekuasaan yang dimiliki para elit tersebut, bahwa elit lokal berkuasa untuk mengatur segala bentuk kehidupan, baik itu manusia, hewan maupun tumbuhan. Hal ini selaras dengan yang disampaikan oleh Bapak David sebagai ketua lembaga masyarakat kecamatan Buntu Pepasan bahwa di Toraja sendiri, elit lokal memiliki kekuasaan dalam membangun esensi *tallu lolona*, yaitu kehidupan manusia, kehidupan hewan dan kehidupan tanaman. Eksistensi dari tiga komponen ini adalah satu kesatuan hal yang terus bersinergi dibawah kepemimpinan dan kekuasaan manusia sebagai makhluk tertinggi ciptaan Tuhan. Itulah yang selalu mendorong elit lokal untuk terus menumbuhkan nilai-nilai tersebut dan melestarikannya.

Menurut Sapri (2022) filosofi Tallu Lolona dipahami oleh masyarakat Toraja ditinjau dari tiga pin kehidupan, yaitu: lolo tau (manusia), lolo patuoan (hewan), dan lolo tananan (tumbuhan). Filosofi hidup tersebut digambarkan melalui sejenis tumbuhan yang disebut *kambunni*, yaitu sejenis tumbuhan yang tidak berdaun, hanya berbulu dan bercabang. Tumbuhan ini digunakan sebagai hiasan berupa karangan bunga dan lambang *lettoan* (lambang budaya Toraja yang menggambarkan seekor ayam dan bulan pada upacara *rambu tuka*). Tanaman yang digunakan adalah ranting *kambunni* yang dipetik hanya pada bagian ujungnya saja. Berbeda dengan tanaman lainnya, ujung *kambunni* selalu tumbuh dan menghasilkan tunas-tunas muda baru. Dengan demikian, *kambunni* merupakan simbol kehidupan Tallu Lolona dalam budaya Toraja (Sudarsi et al., 2022). Sistem kehidupan dan hubungan yang harmonis akan tercipta dan tidak akan binasa jika dipelihara dengan baik, seperti halnya tunas *kambunni* yang akan menghasilkan tunas-tunas baru yang berlipat ganda tanpa henti jika tidak dirusak/dipetik (Baan et al., 2022).

Ketiga faktor tersebut (*lolo tau, lolo patuoan, dan lolo tananan*) berperan penting dalam kelangsungan hidup masyarakat Toraja, itu pula yang menjadi inti ajaran *Aluk To Dolo*. *Aluk To Dolo* merupakan keseluruhan aturan agama dan sosial dalam masyarakat Toraja masa lalu, masa kini dan masa depan (Salam et al., 2017). Dalam keyakinan itu, ketiga faktor tersebut (*lolo tau, lolo patuoan, dan lolo tananan*) harus tetap seimbang agar fungsi dan manfaatnya tetap terjaga. Jika salah satunya terganggu maka akan mengganggu keharmonisan hidup dan menimbulkan masalah. Oleh karena itu, bagi masyarakat Toraja, kehidupan yang saling menguntungkan antara manusia, hewan, dan tumbuhan merupakan suatu bentuk kehidupan yang ideal.

### **c. Indikator Reputasi**

Menurut Karl Marx dalam Varma (1975) bahwa Reputasi yaitu kemampuan elit dalam memproses berbagai permasalahan dan kemudian dirumuskan menjadi keputusan yang berdampak pada kehidupan masyarakat.

Dalam konteks masyarakat adat, elit yang memiliki kuasa khususnya elit sipil atau tokoh adat, memiliki kemampuan untuk memproses permasalahan-permasalahan yang kemudian dirumuskan menjadi kebijakan untuk masyarakatnya. Reputasi yang baik menjadikan elit mendapatkan kepercayaan masyarakat dan dianggap mampu mengelola dan mengatur kehidupan masyarakat adat (Keller, 1984).

Terkait dengan reputasi elit lokal, Bapak Nathaniel selaku camat Buntu Pepasan mengatakan “Sebagai pihak yang diberikan kepercayaan oleh masyarakat, maka dari itu kita memiliki tanggung jawab yang besar bagaimana menggunakan kepercayaan dari masyarakat demi kepentingan dan keberlangsungan masyarakat adat itu sendiri. Artinya bahwa kita harus memberikan yang terbaik buat masyarakat kita agar tidak menimbulkan kekecewaan terhadap masyarakat.”

Reputasi yang ditunjukkan oleh para elit memberikan pengaruh yang signifikan terhadap tingkat kepercayaan masyarakat kepada elit itu sendiri. Semakin baik reputasi yang ditunjukkan oleh para elit, maka semakin tinggi kepercayaan yang diberikan masyarakat kepada mereka. Sebaliknya, jika reputasi yang buruk ditonjolkan oleh para elit, maka masyarakat dengan cepat atau lambat akan mengurangi tingkat kepercayaan mereka kepada para elit.

Reputasi elit lokal memiliki dampak yang signifikan terhadap kepercayaan masyarakat dalam beberapa cara yang berbeda. Konsistensi dalam perilaku dan keputusan serta integritas mereka berperan besar dalam membangun kepercayaan. Ketika elit lokal secara terus-menerus menunjukkan kesesuaian dengan nilai-nilai budaya dan keadilan, masyarakat cenderung memiliki kepercayaan yang tinggi pada mereka. Keterbukaan dan transparansi juga menjadi kunci dalam memperkuat kepercayaan, karena masyarakat akan lebih percaya pada elit lokal yang jujur dan terbuka dalam proses pengambilan keputusan serta berkomunikasi secara jelas mengenai alasan di balik keputusan mereka.

### **3.3 Peran Elit Lokal dalam meningkatkan eksistensi masyarakat adat di Kecamatan Buntu Pepasan: Dimensi Pembuatan Keputusan**

Dalam dimensi keputusan, elit lokal mengambil peran sebagai pihak yang memiliki kewenangan dan kekuasaan untuk merancang, merumuskan dan mengimplementasikan kebijakan tersebut kepada pihak yang dikuasai atau dalam hal ini yaitu masyarakat. Dalam konteks elit lokal di Kecamatan Buntu Pepasan, yang memiliki pengaruh besar sebagai pembuat regulasi maupun keputusan yaitu elit formal sebagai pihak pemerintah. Sementara itu, elit sipil dan elit agama memiliki peran dalam pembuatan keputusan secara tidak formal atau aturan tidak tertulis yang kemudian menjadi pedoman bagi masyarakat dalam menjalani hubungan antar masyarakat.

Salah satu bentuk regulasi yang diterbitkan oleh pemerintah Kabupaten Toraja Utara yaitu Peraturan daerah Kabupaten Toraja Utara Nomor 1 tahun 2019 tentang Pengakuan dan Perlindungan Hak Masyarakat Adat. Peraturan ini menitikberatkan pemberian hak kepada masyarakat adat sebagai hak asal usul yang pada hakikatnya melekat pada masyarakat adat, yang bersumber dari sistem sosial dan budayanya. Pada pasal 8 di dalam peraturan tersebut,

disebutkan bahwa dalam rangka memperkuat kapasitas masyarakat adat, pemerintah daerah wajib:

- 1) Memfasilitasi masyarakat adat untuk mengembangkan manajemen pengelolaan wilayah adat berdasarkan kearifan lokal
- 2) Melaksanakan program yang bertujuan untuk memperkuat pengetahuan masyarakat adat terkait hak-haknya sebagai warga negara maupun hak sebagai masyarakat adat
- 3) Berdasarkan musyawarah dengan masyarakat adat, pemerintah daerah mengembangkan muatan lokal pada lembaga pendidikan formal di semua tingkatan
- 4) Memfasilitasi masyarakat adat dalam mengembangkan sekolah adat
- 5) Secara aktif melibatkan masyarakat adat dalam musrenbang di setiap tingkatan pemerintahan

Dapat dilihat pada peraturan tersebut bahwa pemerintah daerah kabupaten Toraja Utara, dalam hal ini yaitu elit formal memiliki tanggung jawab atas penguatan masyarakat adat dan lembaga adat. Pemerintah daerah secara aktif melibatkan masyarakat adat dan lembaga adat dalam proses pengambilan keputusan di daerah termasuk dalam perencanaan pembangunan daerah. Pemerintah daerah bersama dengan masyarakat adat menyusun dan mengembangkan program pemberdayaan masyarakat adat dan lembaga adat. Selanjutnya, pemerintah daerah berkewajiban untuk memfasilitasi masyarakat adat dalam melaksanakan *kombongan* atau rapat berdasarkan permintaan masyarakat adat. Dengan demikian, akan terbangun dialog antara lembaga adat dengan pemerintah dan lembaga keagamaan dalam rangka membangun hubungan yang harmonis antara masyarakat adat, pemerintah dan lembaga keagamaan.

### **3.4 Diskusi Temuan Utama Penelitian**

Berdasarkan hasil dari penelitian yang telah dilakukan beserta dengan pembahasannya, maka peneliti menarik kesimpulan bahwa Peran Elit Lokal Dalam Menguatkan Eksistensi Masyarakat Adat di Kecamatan Buntu Pepasan memberikan pengaruh terhadap eksistensi masyarakat adat di kecamatan Buntu Pepasan khususnya terkait kehidupan budaya dan adat pada masyarakat adat di kecamatan Buntu Pepasan.

Sebagai pihak yang diberi kepercayaan oleh masyarakat, elit lokal di kecamatan Buntu Pepasan memiliki tanggung jawab untuk mengelola dan memelihara kehidupan masyarakat adat. Permasalahan-permasalahan mengenai penyimpangan adat dan budaya yang terjadi di kecamatan Buntu Pepasan diselesaikan oleh elit lokal dengan mempergunakan reputasi baik mereka dan memberikan pengaruh serta mempergunakan kekuasaan mereka untuk menguatkan eksistensi masyarakat adat di kecamatan Buntu Pepasan.

Elit lokal yang memiliki kewenangan untuk melaksanakan undang-undang dalam konteks ini adalah Bupati Toraja Utara sebagai salah satu elit formal mengeluarkan Peraturan Daerah Kabupaten Toraja Utara Nomor 1 tahun 2019 tentang Pengakuan dan Perlindungan Hak Masyarakat Adat. Dengan adanya peraturan ini, maka elit lokal di tingkat kecamatan kemudian melaksanakan peraturan tersebut sebagai pedoman dalam mengelola kehidupan masyarakat serta menguatkan eksistensi masyarakat adat itu sendiri.

## **IV. KESIMPULAN**

Penulis menyimpulkan bahwa peran elit lokal dalam menguatkan eksistensi masyarakat adat di kecamatan Buntu Pepasan khususnya terkait kehidupan budaya dan adat pada masyarakat adat di kecamatan Buntu Pepasan. Elit lokal di kecamatan Buntu Pepasan memiliki posisi sebagai pihak yang berperan dalam mempertahankan warisan budaya dan

keberlangsungan masyarakat adat. Elit lokal sebagai pemimpin dalam pelaksanaan adat istiadat, merawat warisan budaya, dan menyelesaikan konflik-konflik yang mungkin timbul dalam masyarakat.

**Keterbatasan penelitian.** Penelitian ini memiliki kekurangan utama yaitu waktu penelitian dan juga hanya dilakukan di satu kecamatan sebagai sampel yang diambil sebagai representasi kebudayaan Toraja secara umum.

**Arah Masa Depan Penelitian (*future work*).** Penulis menyadari masih awalnya temuan penelitian, oleh karena itu penulis menyarankan agar dapat dilakukan penelitian lanjutan pada lokasi yang lebih luas lingkungannya untuk menemukan hasil yang lebih mendalam.

## V. UCAPAN TERIMA KASIH

Ucapan terima kasih terutama ditujukan kepada Camat Buntu Pepasan beserta jajarannya yang telah memberikan kesempatan penulis untuk melaksanakan penelitian, serta seluruh pihak yang membantu dan mensukseskan pelaksanaan penelitian.

## VI. DAFTAR PUSTAKA

- Aswar. (2023). Makna Filosofi Hierarki Pada Sinergitas. *Jurnal Panggung*, 33(3), 315–333.
- Baan, A., Allo, M. D. G., & Patak, A. A. (2022). The cultural attitudes of a funeral ritual discourse in the indigenous Torajan, Indonesia. *Heliyon*, 8(2).
- Badan Pusat Statistik. (2022). *Kecamatan Buntu Pepasan Dalam Angka 2022*. Badan Pusat Statistik.
- Barumbun, M. (2013). Potret Pergeseran Makna Budaya Ma'Nene Di Kecamatan Baruppu Kabupaten Toraja Utara Provinsi Sulawesi Selatan. *Sosiohumaniora*, 15(3), 330–336.
- Fadli, M., Bailusy, M. K., Nas, J., & Zulfikar, A. (2018). Keterlibatan Elit Lokal dalam Peningkatan Partisipasi Politik pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Toraja Utara Tahun 2015. *Aristo*, 6(2), 301. <https://doi.org/10.24269/ars.v6i2.1025>
- Haryanto. (2005). *Kekuasaan Elit : Suatu Bahasan Pengantar*. Program Pascasarjana (S2), Politik Lokal dan Otonomi daerah, Universitas Gadjah Mada.
- Haryanto. (2009). Elit Politik Lokal dalam Perubahan Sistem Politik. *Jurnal Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik*, 12(2), 131–148.
- Keller, S. I. (1984). *Penguasa dan kelompok elit: peranan elit-penentu dalam masyarakat modern*. Rajawali. <https://books.google.co.id/books?id=SFhfNAAACAAJ>
- Nasya, A. G. A. (2022). *Peran Elite Lokal Dalam Pembangunan Desa Kajongan Kecamatan Kaje Kabupaten Pekalongan*. Universitas Jenderal Soedirman.
- Paledung, G. B. (2021). DAMPAK PEMBENTUKAN LEMBAGA ADAT DESA TERHADAP LEMBAGA ADAT TONGKONAN DI KABUPATEN TORAJA UTARA. *Jurnal Adat Dan Budaya Indonesia*, 3(2), 45–53. <https://doi.org/10.23887/jabi.v3i2.35077>
- Salam, S., Husain, M. S. H., & Tangsi, T. (2017). The symbolic meanings of Toraja carving motifs. *Panggung*, 27(3), 298287.
- Sapri, S. (2022). Makna Falsafah Budaya Tallu Lolona. *MELO: Jurnal Studi Agama-Agama*, 2(1), 1–11.
- Sawaludin, S., Haslan, M. M., & Basariah, B. (2022). Eksistensi dan Peran Elit dalam

Mempertahankan Nilai-Nilai Kearifan Lokal Pada Masyarakat Dusun Sade Desa Rambitan Lombok Tengah. *Jurnal Ilmiah Profesi Pendidikan*, 7(4b), 2426–2432. <https://doi.org/10.29303/jipp.v7i4b.941>

Sudarsi, E. T., Taula'bi, N., & Allo, M. D. G. (2022). Representation of character education values in the tradition of "sikarume" Toraja. *KEMBARA: Jurnal Keilmuan Bahasa, Sastra, Dan Pengajarannya*, 8(1), 25–36.

Tonapa, J. ., & Kumala, A. (2022). *Ritual Adat Adu Kerbau di Toraja Disusupi Judi Terselubung, Polisi Dibuat tak Berdaya*. Tvonenews.Com. <https://www.tvonenews.com/daerah/sulawesi/71052-ritual-adat-adu-kerbau-di-toraja-disusupi-judi-terselubung-polisi-dibuat-tak-berdaya>

Varma, S. (1975). *Modern Political Theory*. Vikas Publishing House. <https://books.google.co.id/books?id=8IVXVqR19z4C>

